

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit)*.
- Hadi, S. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 185-194.
- Indriani, N. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017* (Skripsi). Universitas Semarang, Semarang, Indonesia.
- Provinsi Sumatera Barat. 2008. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Sumatera Barat. 2011. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Provinsi Sumatera Barat. 2011. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Republik Indonesia. 2009. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 8)*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahida, W. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 1(1), 11-22.